

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).

Donald A. Rumokoy. 2002. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press).

HAW. Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Mardalis. 1995. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Miriam Budiharjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).

Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia).

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1927).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Internet

<http://kbbi.web.id/kelola>.

[http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan-sumber-
pendapatan-daerah-terbesar](http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan-sumber-pendapatan-daerah-terbesar).

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat

[http://Lawisjustice.blogspot.in/2011/06/tujuan-dari-dana-
perimbangan.html?m=1](http://Lawisjustice.blogspot.in/2011/06/tujuan-dari-dana-perimbangan.html?m=1)